

EDITORIAL

Jurnal TINGKAP Volume IX, No. 1 bulan April 2013 ini menyajikan 6 artikel, yaitu 3 artikel hasil penelitian, 3 artikel konseptual, dan 1 Resensi buku. Tulisan-tulisan tersebut terangkum dalam satu tema: *Politik dan Budaya* dan meliputi berbagai topik, yaitu: *Gaya Tari dalam Konteks Nilai Budaya: Studi Kasus Tari Piriang Sulueh Minangkabau* (Afifah Asriati), *Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika dalam Pemberlakuan Lend-Lease Act 1941* (Alia Azmi), *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisasi di Minangkabau* (Jeffrey Hadler), *Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia* (Rahmadhona Fitri Helmi), *Ideologi Politik dan Motivasi Pelayanan Publik di Kalangan PNS Kota Padang* (Syamsir dan Muhamad Ali Embi), dan *Perbedaan Persepsi Penyelenggara Nagari Luhak dan Rantau terhadap Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif* (Yasril Yunus). Selain itu Jurnal edisi ini juga dilengkapi dengan satu resensi buku yang ditulis oleh Meztika Zed: *Nagari Koto Gadang Tempo Dulu*.

Pada tulisan pertama dalam edisi ini **Afifah Asriati** mengemukakan berbagai persoalan tentang gaya tari dalam konteks nilai budaya melalui studi kasus tari *piriang sulueh* Minangkabau. Menurut Afifah, sebagai salah satu tari *piriang* dari sekian banyak tari *Piriang* di Minangkabau, gaya tari *Piriang Sulueh* memiliki kekhasan dibanding dengan tari *piriang* yang lainnya. Secara umum dan lahiriah atau tekstual tari *Piriang* ini mirip dengan tari *Piriang* lainnya. Akan tetapi nilai khas yang diekspresikannya tentu berbeda dengan nilai budaya di nagari yang lainnya. Tari *Piriang Sulueh* ditinjau dari bentuk penyajiannya dapat dikatakan sebagai suatu tari yang memiliki gaya yang spesifik. Bentuk penyajian tari ini di nagari Pariangan sebagai salah satu wilayah gaya Minangkabau yang ada di nagari, diasumsikan memiliki gaya tari yang dipengaruhi oleh orientasi nilai budaya yang mendasarinya. Kajian seperti ini dapat dikatakan sebagai kajian kontekstual. Melalui sebuah penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis kontekstual, Afifah akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tari *Piriang Sulueh* merupakan salah satu karya masyarakat nagari Pariangan secara kolektif dan telah menjadi simbol identitas mereka, sehingga menjadi bahagian integral dalam kehidupan sosio-kulturalnya. Bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang tampil pada penyajian baik dalam elemen penari, gerak, properti, pola lantai, busana, iringan maupun elemen tempat penyajian, semua elemennya tidak lepas dari nilai-nilai budaya adat yang mendasarinya. Secara khusus Afifah menemukan bahwa gaya atau nilai budaya yang inheren dalam tujuh elemen yang berkaitan dengan penari (laki-laki dan perempuan), ragam gerak tari, properti tari, pola lantai tari, busana yang dipakai dalam tari, iringan atau musik tari, dan tempat pertunjukan tari yang berbentuk arena dengan penonton yang mengitarinya. Menurut Afifah pula, sekarang tari ini sudah semakin jarang ditampilkan di nagari ini, namun sudah banyak juga yang bermaksud mendokumentasikannya dalam rekaman dengan menggandakannya sebagai catatan nilai budaya yang akurat.

Pada tulisan kedua **Alia Azmi** membahas tentang Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika dalam Pemberlakuan *Lend-Lease Act* 1941. Menurut Alia Politik luar negeri merupakan salah satu cerminan pandangan dan sikap suatu bangsa dalam politik internasional. Politik luar negeri mencerminkan sikap dan karakter suatu negara untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keamanan dan mencapai kepentingannya di dunia internasional, termasuk politik luar negeri Amerika. Dalam pemutusan kebijakan luar negeri ini, masyarakat Amerika berkali-kali melihat ke pengalaman di masa lampau untuk menghasilkan strategi dan metode yang dianggap paling menguntungkan posisi dan keamanan nasional Amerika. Isolasionisme telah menjadi sikap politik bangsa Amerika sejak berdirinya negara Amerika Serikat. Namun, sikap ini lebih banyak dilanggar karena tindakan sebaliknya, yaitu intervensionis, dianggap lebih mempan untuk menangani masalah. Salah satu politik luar negeri yang dijalankan Amerika dalam menjaga keamanan bangsa Amerika adalah pemberlakuan kebijakan *Lend-Lease Act* 1941. Menurut Alia, Amerika sangat mempertimbangkan keselamatan warga negaranya, oleh karena itu perang bukanlah opsi yang pantas untuk negara tersebut. Akan tetapi, menjelang Perang Dunia II, ketegangan di Eropa dapat berdampak pada Amerika dan membahayakan keamanan dan posisi Amerika di dunia internasional. Oleh sebab itu Amerika meninggalkan politik luar negeri isolasionismenya dan menjalankan kebijakan *Lend-Lease Act* 1941, sebuah langkah yang mengarah pada politik luar negeri intervensionis. Dengan *Lend-Lease Act* 1941, Amerika dapat membantu Inggris menghadang kekuatan Jerman yang berarti juga menjaga perang terjadi di luar Amerika sehingga tidak mengorbankan rakyat sipil. Menurut Alia pula, banyak pihak yang memuji keputusan Amerika untuk terlibat dalam membantu Inggris melawan Jerman melalui kebijakan *Lend-Lease Act* 1941. Akan tetapi, para pendukung idealisme percaya bahwa tindakan tersebut lebih berisiko dibandingkan apabila Jerman berhasil menguasai Inggris. Mereka menganggap keberanian Amerika untuk mempertahankan idealisme non-intervensi lebih berharga; apabila tindakan isolasionisme adalah kebenaran yang dipercaya rakyat Amerika, maka Amerika tidak perlu takut pada apapun. Namun hal ini tidak berlaku dalam pragmatisme, karena kebenaran adalah segala sesuatu yang menghasilkan keberhasilan maksimal. Bantuan Amerika pada beberapa negara di Eropa melalui *Lend-Lease Act* merupakan salah satu langkah awal yang melibatkan Amerika ke dalam Perang Dunia II, dengan kata lain mengakhiri isolasionisme Amerika yang telah diterapkannya sejak puluhan tahun. Kebijakan ini juga dianggap berperan dalam menyebabkan kekalahan poros Axis beberapa tahun berikutnya. Dengan diberlakukannya *Lend-Lease Act*, timbul kontroversi dari dalam negeri Amerika karena dianggap bertentangan dengan politik luar negeri isolasionisme Amerika saat itu. Kebijakan tersebut memberikan posisi baru pada Amerika yaitu sebagai pemberi bantuan pada negara-negara yang terlibat perang. Hal ini tidak sesuai dengan politik luar negeri Amerika yang sejak berakhirnya Perang Dunia I menghindari intervensi perang. Pada awalnya terdapat penolakan dari publik dan sebagian anggota Kongres akan kebijakan tersebut. Akan tetapi, pendukung peraturan tersebut menganggap bahwa *Lend-Lease Act* adalah tindakan yang tepat

untuk menjaga keamanan Amerika, karena apabila poros Allies, yaitu sekutu Amerika; Inggris, Rusia, dan Prancis jatuh ke tangan Jerman dan sekutunya, posisi Amerika akan berada dalam bahaya juga.

Pada bagian ketiga tulisan ini **Jeffrey Hadler** mencoba pula menyajikan tulisannya tentang Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisasi di Minangkabau. Dalam tulisannya ini Jeffrey mengemukakan dua pertanyaan utama sejarah Indonesia. *Pertama*, mengapa budaya Minangkabau di dataran tinggi Sumatera Barat melahirkan begitu banyak pemimpin Indonesia generasi pertama yang dinamik dan dengan bermacam ragam ideologi? *Kedua*, bagaimana suatu matriarkat bertahan di Sumatera Barat sementara di mana-mana di Asia ia dirongrong habis oleh kebijakan-kebijakan negara kolonial dan nasional? Jawaban-jawabannya terkait dan terhubung dengan ketegangan terus menerus dalam budaya Minangkabau, yakni antara Islam dan adat matriarkat. Pertanyaan utama penelitian ini – mengapa matriarkat bertahan? – menurut Jeffrey telah dihindari oleh banyak peneliti yang terpancing ke Minangkabau oleh apa yang tampaknya merupakan paradoks masyarakat Muslim matrilineal. Pakar-pakar itu bergantung pada buku-buku penuntun yang sudah biasa dipakai dan mencoba mendalami entah degradasi atau daya tahan tradisi-tradisi matrilineal di kampung ini atau itu. Tapi di sini jawabannya datang bukan dari studi kasus melainkan melalui suatu pendekatan komparatif terhadap sejarah masyarakat-masyarakat matrilineal di bawah penguasa-penguasa kolonial, khususnya tradisi-tradisi matrilineal yang terdapat di Negeri Sembilan Malaysia dan Kerala di India. Kedua tradisi itu telah dibongkar habis oleh negara kolonial. Konsep-konsep legal baru, serta gerak laju kemajuan dan modernitas yang membuat matriarkat ditempatkan di masa lalu yang memalukan dan primitif, mendorong orang untuk meninggalkan adat atavistik mereka itu. Selain itu, menurut Jeffrey, misteri tentang generasi pertama pemimpin-pemimpin modern Minangkabau menimbulkan keingintahuan orang Indonesia yang rindu akan idealisme politis tanpa dikotori realitas politis. Generasi dari masa ini secara politis bermacam ragam aliran dan dinamik karena tumbuh dewasa dalam suatu dunia di mana setiap kebenaran suci dipertanyakan. Bahkan di kampung pun, gagasan akan rumah, keluarga, dan wewenang orangtua, dan pendidikan ditantang oleh reformis-reformis Islam dan negara kolonial. Lebih daripada di manapun di Indonesia, di Sumatera Barat tidak apa pun yang bisa diterima bersih begitu. Menurut Jeffrey, yang paling penting – dan merupakan alasan mengapa Sumatera Barat melahirkan begitu banyak bintang-bintang nasional – adalah perubahan-perubahan di dalam rumah-tangga masyarakat Minangkabau. Perubahan-perubahan ini, yang didorong oleh ketegangan terus menerus antara Islam reformis dan adat istiadat matriarkat, lebih jauh lagi dipengaruhi oleh campur tangan negara kolonial. Matriarkat yang berdaya tahan tinggi itu membuat reformis muslim dan kaum progresif kolonial mengadakan penelaahan sangat rinci atas budaya Minangkabau. Rumah, keluarga, kampung, dan konsep anak semuanya tertantang secara agresif dan lantas tertransformasi. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, orang Minangkabau dipaksa mempertanyakan definisi-definisi budaya yang tampaknya elementer dan sudah berterima. Kondisi perubahan fundamental dan tak terhindarkan inilah yang membuat Minangkabau unik dan menarik. Orang yang lahir di Sumatera Barat pada tahun-

tahun itu tidak punya kebenaran gampang tempat mereka bisa menancapkan kaki sebagai penopang. Karena kehilangan keseimbangan, merekapun mampu membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru dan mampu berjuang untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan itu.

Pada bagian keempat tulisan ini **Rahmadhona Fitri Helmi** mencoba pula menyajikan tulisannya berkenaan dengan Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia. Rahmadhona berpendapat bahwa Globalisasi yang terjadi pada dunia saat ini tidak hanya menyebabkan masalah perputaran investasi dan percepatan informasi, melainkan juga terdapat masalah pekerja asing di dalamnya. Pada saat ini, jumlah penduduk dunia semakin meningkat tajam, khususnya di negara-negara yang jumlah pertumbuhan penduduknya besar. Hal ini menjadi pencetus para pekerja, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja di negara yang lebih menawarkan gaji (upah) yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara asalnya. Menurut Rahmadhona, politik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia dalam kaitannya mengatasi kebergantungan terhadap pekerja konstruksi asing mengandung beberapa makna, yaitu: *Pertama*, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia terlalu menekankan pada penggunaan kekuatan militer. Penyelesaian seperti ini tidak dapat menyelesaikan *grass root* dari masalah yang ada. *Kedua*, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia di satu sisi bertujuan untuk mengamankan warganegara Malaysia dari ancaman pekerja *illegal*, akan tetapi di sisi lain kebijakan itu sendiri telah mengancam *human security* dari pekerja *illegal*, terutama yang berasal dari Indonesia. *Ketiga*, dalam Undang-undang Imigrasi Malaysia masih terdapat kekurangan yang akan mempengaruhi efektifitas pengendalian pekerja *illegal*. *Keempat*, penerapan kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak bersedia menerima kembali tenaga kerja yang telah melengkapi dokumennya merupakan tindakan yang kurang efektif dan efisien. Sementara itu, dari pihak Indonesia sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan hancur dan lemahnya pengurusan pekerja Indonesia. *Pertama*, tidak ada konsep dan program komprehensif dari pemerintah. Pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya perbaikan, sementara di sisi lain pemerintah terlalu dominan dan kebijakan yang dibuat cenderung tidak menyokong berkembangnya usaha pekerja Indonesia. *Kedua*, belum maksimalnya pelayanan ins-tansi karena sifatnya yang hanya fungsional. Di samping itu, masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar instansi berkaitan yang juga merupakan kekurangan yang harus di atasi. Keadaan ini cenderung memerlukan biaya tinggi dan terjadinya pungutan liar. *Ketiga*, lemahnya pola pendidikan dan latihan yang seharusnya dilakukan bagi pekerja Indonesia. Badan pendidikan dan latihan (Badiklat) yang ada ternyata belum efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya pekerja Indonesia tersebut. *Keempat*, maraknya perilaku KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan kecurangan yang terjadi dalam proses pengiriman pekerja Indonesia seperti keperluan dokumen, penyalahgunaan dan pengiriman pekerja Indonesia *illegal*. *Kelima*, belum optimalnya usaha perlindungan pemerintah atas hak-hak pekerja Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Pada bagian kelima tulisan dalam edisi ini **Syamsir dan Muhamad Ali Embi** mengemukakan hasil penelitian mereka tentang Ideologi Politik dan Motivasi Pelayanan Publik di Kalangan PNS Kota Padang. Menurut Syamsir dan Muhamad Ali Embi motivasi pelayanan publik merupakan faktor penting yang akan menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan oleh seseorang pegawai publik atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada masyarakat yang memerlukannya. Apalagi bila mengingat bahwa pelayanan publik merupakan tugas penting dan menyangkut kepentingan orang banyak. Namun kadangkala tugas-tugas pelayanan publik bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik atau aliran politik yang dianut oleh para pegawai publik yang bersangkutan. Artinya, PNS yang menganut aliran politik tertentu bisa saja memiliki kadar atau tingkat motivasi pelayanan publik tertentu sesuai dengan keyakinan dan ideologi politik yang dianutnya, dan pada akhirnya akan berpengaruh pula kepada kualitas pelayanan publik yang diberikannya kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan mereka. Selain itu, menurut keduanya, permasalahan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS di Indonesia dalam kaitannya dengan keyakinan (ideologi) politik ini sangat menarik untuk diteliti karena, selain belum jarang diteliti, keterkaitan antara keyakinan (ideologi) politik dan motivasi pelayanan publik sangat mungkin terjadi di kalangan para pegawai, termasuk para PNS. Apalagi bila mengingat bahwa *netralitas PNS* masih “diragukan” dalam implementasinya, meskipun undang-undang dan berbagai peraturan tentang PNS lainnya telah menetapkan dan menginstruksikan hal tersebut kepada setiap PNS. Sementara di sisi lain peranan motivasi pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas seorang PNS sebagai pelayan publik. Selain itu, setiap pelayan publik memang seharusnya terbebas dari pengaruh aliran (ideologi) politik agar mereka benar-benar mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada semua masyarakat tanpa pandang bulu apakah masyarakat yang dilayaninya itu sama atau berbeda aliran politiknya dengan mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut keduanya ingin mengungkap dan mencari jawaban tentang apakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ideologi (keyakinan) politik dan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS Kota Padang? Melalui suatu penelitian dengan pendekatan *mixing* (campuran), Syamsir dan Muhamad Ali Embi sampai pada kesimpulan bahwa memang terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor ideologi (keyakinan) politik PNS dan tingkat motivasi pelayanan publik atau PSM yang mereka miliki.

Akhirnya pada tulisan terakhir (keenam) dalam edisi ini **Yasril Yunus**, berdasarkan hasil penelitiannya, menjelaskan pula tentang Perbedaan Persepsi Penyelenggara Nagari Luhak dan Rantau terhadap Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif. Menurut Yasril, perpindahan dari *nagari* ke desa pada masa Orde Baru merupakan sebuah *culture shock* di Sumatera Barat, karena perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar perubahan struktural, tetapi sekaligus juga perubahan orientasi dan filosofinya. Setelah reformasi, desa dikembalikan lagi ke bentuk *nagari*. Akibat kedua kejadian itu, berbagai konflik antara nilai adat dengan nilai pemerintahan modern bermunculan. Selain itu muncul pula berbagai persepsi para penyelenggara pemerintah nagari terhadap model pemerintahan nagari yang baru,

terutama pemerintahan nagari yang partisipatif. Melalui penelitiannya Yasril Yunus ingin mengungkapkan perbedaan persepsi tersebut pada dua nagari (*luhak* dan *rantau*) dan berdasarkan hasil penelitiannya itu beliau berkesimpulan bahwa pada umumnya kedua Nagari tersebut memiliki komitmen yang sama-sama setuju dengan penerapan model pemerintahan Nagari yang Partisipatif, meskipun mereka melihat hambatan terbesar itu adalah pada SDM KAN, Organisasi geneologis (*mamak rumah, jurai, paruik, dan peng-hulu*), serta lemahnya kekuatan ekonomi dan moral pimpinan organisasi geneologis tersebut. Kombinasi kelembagaan nagari yang dianggap mampu mewakili masyarakat adalah Bamus (BPRN) dengan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuda. Kemudian, yang efektif sebagai penyelenggara nagari itu adalah KAN, Bamus (BPRN) dan Wali Nagari. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan Nagari selama ini belum menyerap secara memuaskan nilai demokrasi adat, belum mampu meredam konflik dan belum sukses menggerakkan nagari sebagai pemerintahan yang terkecil. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Yasril Yunus mengemukakan saran antara lain: 1) perlunya ditetapkan Peraturan Nagari (*adaik salingka nagari*) tentang Kode Etik Ninik Mamak, yang bersumber dari Undang-undang Adat yang berhubungan dengan pemangku adat, mulai dari struktur paling bawah yaitu mamak rumah sampai ke ketua KAN, dengan standar moral yang baku sesuai dengan takaran adat dan syarak; 2) perlunya dibentuk peradilan adat yang dipimpin oleh hakim adat sepanjang alur dan patut sesuai *adaik salingka nagari* dengan sebuah Peraturan Nagari, dan difasilitasi oleh pemerintahan daerah kabupaten; 3) perlunya penguatan SDM organisasi geneologis, penerapan peraturan nagari tentang protokoler Ninik Mamak, dan sebagainya.

Tulisan-tulisan yang disajikan dalam edisi Volume IX Nomor 1 April 2013 ini sangat baik dibaca dan dipahami terutama bagi mereka yang ingin mendalami berbagai persoalan yang menyangkut berbagai persoalan politik dan budaya, sesuai dengan tema pada edisi ini. Akhirnya redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan selamat menikmati tulisan ini bagi para pembaca semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi para pembaca sekalian.

Selamat membaca...!

Syamsir
Ketua Penyunting